

DAMPAK PEMBANGUNAN TERHADAP KEPENDUDUKAN
(Studi Tentang Mobilitas Eksternal Pada Pembangunan Bendungan
di Jawa Barat)

Oleh :

Opan S.Suwartapradja

ABSTRAK

Mobilitas penduduk merupakan salah satu komponen kependudukan selain fertilitas dan mortalitas. Kajian mobilitas penduduk yang dilakukan selama ini mengenai mobilitas internal dan atau belum mengkaji mobilitas eksternal. Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan, menggambarkan atau melukiskan mobilitas eksternal yang disebabkan oleh suatu pembangunan. Data yang dipergunakan berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode deskriptif analisis melalui pendekatan kualitatif.

Mobilitas penduduk yang terkena pembangunan erat terkait dengan pelaksanaan pembangunan. Pada pembangunan yang tersendat-sendat terjadi perpindahan yang permanen (migrasi) dan non-permanen (sirkulasi), sedangkan pada pembangunan yang tidak tersendat-sendat perpindahan yang terjadi secara permanen (Migration). Mobilitas yang terjadi karena desakan pembangunan dan atau **tidak ada niatan** untuk pindah, sehingga pengambilan keputusannya bukan secara individual seperti yang terjadi pada mobilitas internal (**ada niatan untuk pindah**) akan tetapi secara kolektif. Proses perpindahannya meliputi tiga kriteria yaitu pindah diatur dan difasilitasi oleh pemerintah, keinginan sendiri dan tergantung kepada orang lain. Proses dan pilihan daerah tujuan pindah terkait dengan strata sosial masyarakat yaitu golongan miskin kepindahannya diatur dan difasilitasi oleh pemerintah, golongan kaya atas pilihan sendiri dan golongan menengah tergantung kepada orang lain.

Dari temuan lapangan dapat dikonsepsikan bahwa mobilitas eksternal adalah perpindahan penduduk yang disebabkan oleh suatu pembangunan yang meliputi 3 pola, yaitu diatur pemerintah, keinginan sendiri dan tergantung orang lain. Diatur pemerintah melalui program transmigrasi dan transmigrasi lokal, pilihan sendiri pindah ke daerah sekitar pembangunan dan tergantung kepada orang lain pindah ke daerah sekitar dan luar pembangunan yang kepindahannya secara kolektif dan individual.

Kata Kunci : Pembangunan, mobilitas eksternal

**DAMPAK PEMBANGUNAN TERHADAP KEPENDUDUKAN
(Studi Tentang Mobilitas Eksternal Pada Pembangunan Bendungan
di Jawa Barat)*)**

Oleh :

Opan S.Suwartapradja)**

I. PENDAHULUAN

Pembangunan mulai gencar dilaksanakan sejak pemerintahan Orde Baru (ORBA). Arah pembangunan mengacu kepada garis-garis besar haluan negara (GBHN) yang dirancang untuk 25 tahun ke depan melalui tahapan-tahapan pembangunan lima tahunan yang disebut Repelita. Pembangunan yang dilaksanakan lebih menekankan kepada pembangunan ekonomi baik dibidang industri maupun dibidang pertanian dengan sarana dan prasarana penunjangnya. Dibidang industrialisasi yang berkembang seperti sekarang ini telah menimbulkan perubahan lingkungan fisik dan biogeofisik. Perubahan tataguna lahan misalnya, lahan pertanian beralih menjadi sentra-sentra industri, perumahan, rumah sakit, jalan tol dan bendungan. Dampak terhadap aspek sosial, khususnya terhadap populasi yang terkena pembangunan, yaitu harus pindah, merintis ekonominya ditempat yang baru dan atau mengadaptasikan (*adaptation*) dirinya dengan lingkungannya yang baru.

Mekanisasi pertanianpun berdampak terhadap semakin sempitnya lapangan pekerjaan buruh tani. Berkurangnya lapangan pekerjaan bagi buruh tani tidak hanya perkembangan teknologi pertanian akan tetapi juga karena semakin sempitnya luas pemilikan lahan sebagai dampak dari alih fungsi lahan dan sistem pewarisan. BPS mencatat bahwa luas pemilikan lahan pada tahun 1980-an rata-rata 0,5 ha tiap KK dan kemudian menurun kurang dari 0,5 ha karena alih fungsi lahan dan sistem pewarisan.

*) Makalah, Disampaikan pada Sosialisasi Pembangunan Waduk Jatigede, Disbudpar Jawa Barat, 2007

**) Staf Pengajar Jurusan Antropologi FISIP-UNPAD dan Peneliti PPK&SDM dan PPSDAL-LPPM-UNPAD

Luas pemilikan lahan pertanian di Jawa Barat misalnya, sebelum tahun 1980-an rata-rata 0,5 ha tiap petani dan pengolahannya tidak hanya dilakukan oleh pemilik akan tetapi juga mempekerjakan buruh tani. Peluang kerja buruh tani kemudian semakin berkurang dengan adanya sistem pewarisan dan alih fungsi lahan yaitu rata-rata 0,2 ha tiap petani (Mantra, 1985 dan Stoler, 1975 dalam Mantra 1985). Pengolahan lahan yang semula menggunakan tenaga kerja keluarga dan buruh tani, pada saat sekarang tidak lagi mempergunakan buruh tani akan tetapi langsung dikerjakan oleh pemiliknya bersama anggota keluarganya. Dampaknya, buruh tani semakin termarginalkan, sehingga tidak sedikit buruh tani dan atau anak-anak buruh tani sebagai penerus, tidak lagi bekerja disektor pertanian menjadi buruh tani, akan tetapi pergi ke kota untuk bekerja disektor non-pertanian, laki-laki menjadi pedagang dan tukang bangunan dan perempuan menjadi pramuwisma.

Kemajuan teknologi dan pembangunan, seperti juga dikemukakan Todaro (1992), Titus (1982) dalam Mantra (1992) dan modernisasi di perdesaan (Saefullah, 2008) telah merubah paradigma berpikir masyarakat petani. Meningkatnya mobilitas horizontal desa-kota baik permanen (migrasi) maupun non-permanen (sirkulasi) dilakukan oleh golongan menengah dan miskin dan mobilitas vertikal terutama pada golongan kaya. Di lain pihak telah terjadi perubahan sistem nilai yaitu bagi golongan kaya anak-anak mereka tidak lagi diharapkan dapat melanjutkan pekerjaannya, akan tetapi beralih ke sektor formal dan pada golongan menengah dan miskin ke sektor informal di kota (Kusnaka dan Utja, 2000; Suwartapradja, 1976).

Tulisan ini merupakan cuplikan dari hasil penelitian lapangan yang dituangkan dalam laporan penelitian. Data yang disajikan melalui pendekatan kualitatif. Tujuannya adalah mendeskripsikan mengenai mobilitas penduduk yang terkena suatu proyek pembangunan baik pada pembangunan yang tidak tersendat-sendat maupun pada pembangunan yang tersendat-sendat. Perpindahan mereka mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perpindahan yang tidak terkena pembangunan dan belum menjadi kajian demographer terutama dalam proses perpindahannya, sehingga menjadi pertimbangan untuk disajikan dalam tulisan ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pembangunan

Pembangunan pada hakekatnya adalah merubah lingkungan. Tidak ada pembangunan yang tidak merubah lingkungan (Soemarwoto, 1983). Sumber daya alam (SDA) adalah sumber penghidupan khususnya bagi petani di daerah pedesaan. Oleh karena itu pembangunan yang dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya alam akan melibatkan aspek fisik dan aspek sosial. Dari segi fisik, aset yang terkena pembangunan umumnya tanah milik dan penduduk yang bermukim didalamnya harus pindah karena tergusur. Begitu juga populasi yang bermukim disekitar pembangunan yang mempunyai aset dan akses di daerah tapak pembangunan kehilangan sumber penghidupannya. Agar pembangunan itu tidak merugikan rakyat, maka diberikan ganti rugi (Kepres, 1993).

Pembangunan merupakan suatu perubahan, perubahan dari yang kurang baik menjadi lebih baik atau usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat. Kemajuan yang dimaksud seringkali dikaitkan dengan kemajuan material, sehingga pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh suatu masyarakat dibidang ekonomi (Budiman, 2000: 1). Untuk mencapai sasaran tersebut, kemudian dilakukan kegiatan-kegiatan baik dinegara maju maupun di negara yang sedang berkembang. Namun persoalan yang dihadapinya oleh masing-masing negara berlainan. Bagi negara yang sudah maju (kapitalis) persoalannya adalah bagaimana melakukan ekspansi lebih lanjut bagi kehidupan ekonominya yang sudah mapan, sedangkan pada negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, adalah bagaimana bertahan hidup atau bagaimana meletakkan dasar-dasar ekonominya agar dapat bertahan hidup supaya bisa bersaing dipasar internasional.

Peletakan dasar pembangunan semestinya tidak hanya mementingkan aspek ekonomi akan tetapi juga aspek sosial. Pembangunan yang hanya mengutamakan ekonomi dapat menimbulkan instabilitas dan dapat menghancurkan hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai (Budiman, 2000). Pembangunan dibidang sosial

yang selama ini termarginalisasikan, dengan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan non-formal. Melalui pendidikan formal dapat meningkatkan mutu modal manusia dan melalui pendidikan non-formal meningkatkan kemampuan, keterampilan dan keakhlian (*Skill*), sehingga mampu hidup mandiri (Ananta, 1986).

Budiman (2000:2-9) mengkonsepsikan bahwa keberhasilan pembangunan seyogyanya mengacu kepada 5 hal, yaitu : i). Kekayaan rata-rata. Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dengan tolok ukurnya produktivitas masyarakat dan atau produktivitas negara setiap tahunnya, melalui *Gross National Product* (GNP) dan melalui *Gross Domestic Product* (GDP). Tolok ukur tersebut dapat dipergunakan untuk membandingkan negara yang satu dengan negara yang lainnya. ii). Pemerataan. Munculnya kesenjangan sosial adalah tidak meratanya kekayaan keseluruhan yang dimiliki atau yang diproduksi oleh semua penduduk. Sebagian kecil masyarakat memiliki kekayaan yang berlimpah sedangkan sebagian besar masyarakat hidup dalam kemiskinan. Hal ini dapat dijumpai dalam suatu negara yang PNB / kapitanya tinggi, tetapi dimana-mana orang hidup miskin dan tidak mempunyai tempat tinggal. iii). Kualitas kehidupan Tolok ukur kesejahteraan penduduk suatu negara dengan mempergunakan Physical Quality of Life Index (PQLI). Tolok ukur yang dikembangkan oleh Moris (1979, dalam Todaro 1992:102) ini mengenai rata-rata harapan hidup, rata-rata jumlah kematian bayi dan rata-rata prosentase buta huruf dan melek huruf. iv). Kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan dapat terjadi baik dinegara maju maupun dinegara sedang berkembang. Kerusakan lingkungan dinegara maju karena mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran dengan produktivitas yang tinggi tetapi tidak memperhatikan lingkungan. Begitupula pada negara sedang berkembang, mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran dengan produktivitas yang rendah tanpa memperhatikan lingkungan, lingkungan menjadi rusak. Ketidakpedulian terhadap lingkungan sekalipun dengan produktivitas yang tinggi dan menjadikan

suatu negara itu menjadi kaya akan mengalami kehancuran. v). Keadilan sosial dan kesinambungan. Faktor lingkungan dan keadilan sosial berfungsi untuk melestarikan pembangunan agar pembangunan itu berkesinambungan (*Sustainable*). Keadilan sosial bukan hanya pertimbangan moral saja, akan tetapi berkaitan dengan kelestarian pembangunan juga. Melebarnya kesenjangan yang kaya dengan yang miskin rentan terhadap kestabilan politis. Gejala politik dan instabilitas sosial atau gangguan kamtibmas dapat menghancurkan pembangunan yang sudah dicapai, sehingga kerusakan alam dan ketidakadilan merupakan *kerusakan sosial* dapat mengganggu kesinambungan pembangunan.

2.2. Mobilitas Penduduk

Secara konseptual mobilitas penduduk terdiri dari mobilitas permanen atau migrasi (*Migration*) dan mobilitas non permanen atau sirkulasi (*Sirculation*). Mobilitas permanen atau migrasi adalah perpindahan penduduk dengan **tujuan** atau **niatan** untuk menetap di daerah tujuan. Mobilitas non permanen atau sirkulasi **tidak ada niatan** untuk menetap di daerah tujuan. Mobilitas yang dominan adalah mobilitas non-permanen atau sirkulasi (*Sirculation*) terutama dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan karena adanya nilai kefaedahan yang berbeda antara desa dengan kota (Mantra, 1992 :12-15). Adanya perbedaan desa dan kota ini, Lee (1987 : 5-6) mengkonsepsikan karena adanya daya dorong (*Push factors*) dari daerah asal dan daya tarik (*Pull factors*) dari daerah tujuan. Todaro (1992 : 12-16) lebih menekankan pada adanya perbedaan tingkat pendapatan riil antara desa dan kota dan Soemarwoto (1983: 152) adanya arus migrasi desa kota ini lebih menekankan kepada tidak seimbangnya pembangunan di daerah pedesaan dengan didaerah perkotaan, sehingga menimbulkan arus informasi yang tidak seimbang antara desa dan kota. Sedangkan Saefullah (1995 :6; 2008) menyatakan bahwa migrasi desa kota untuk mengatasi kemiskinan yang dialami di desanya, tetapi masih tetap melakukan interaksi dengan daerah asalnya, sehingga mobilitas penduduk desa-kota merupakan “jembatan” transformasi desa - kota.

Keterkaitan antara migrasi penduduk dengan mata pencaharian, yaitu meningkatnya migrasi keluar (*Out-Migration*) dari daerah asal dan meningkatnya migrasi masuk (*in-migration*) terhadap daerah tujuan telah menambah heterogenitas penduduk perkotaan, pertumbuhan dan kepadatan penduduk di daerah perkotaan yang pada gilirannya dapat menimbulkan masalah-masalah sosial yang rentan terhadap terjadinya konflik sosial. Begitupula pada masyarakat pedesaan, perubahan terhadap aspek sosial dan budaya terkait dengan adanya pelaku mobilitas non permanen yang membawa budaya kota ke desanya (Saefullah, 1999: 42-44; 2008).

Dari beberapa kajian tentang mobilitas penduduk yang utama adalah faktor ekonomi yang didorong oleh keinginan-keinginan untuk mengatasi masalah-masalah hidup yang terkait dengan kemiskinan. Namun tidak setiap bentuk migrasi berdampak positif, akan tetapi juga berdampak negatif. Dampak positif bagi faktor eksternal salah satunya dapat membantu program pemerintah melalui transmigrasi dan secara internal dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga yang bersangkutan. Dampak negatif migrasi, terutama migrasi desa kota adalah memunculkan berbagai fenomena sosial di daerah perkotaan yang menjadi tempat tujuan. Seperti rusaknya lingkungan, memunculkan permukiman kumuh, terganggunya keindahan kota oleh pedagang kaki lima, kesemerawutan dan kemacetan lalu lintas dan meningkatnya kriminalitas (Suparlan, 1993).

Mobilitas penduduk baik migrasi (masuk dan keluar) maupun sirkulasi dari desa-kota, desa-desa dan kota-kota seperti dikemukakan di atas, umumnya terkait dengan aspek ekonomi, yaitu untuk meningkatkan taraf hidup. Kepindahannya ke suatu daerah dengan harapan dapat memperbaiki ekonomi rumah tangganya. Bagi pelaku mobilitas non-permanen, meningkatnya sirkulasi erat terkait dengan semakin meningkatnya aksesibilitas baik yang bersifat musiman maupun pulang pergi atau ulang alik (*Jawa = nglaju, Sunda = ngadugdag dan Inggris = Commuter*). Pelaku mobilitas (*Movers*) ini akan membawa hasil usahanya (*Remittance*) ke daerah asalnya (desa), sehingga dibidang ekonomi mempunyai dampak terhadap pembangunan dan atau perekonomian desa. Oleh karena itu mobilitas penduduk

desa- kota dapat dikatakan sebagai “jembatan” antara desa dan kota (Saefullah, 1995: 5-16; 2008).

III. KERANGKA PIKIR

Kajian yang terkait dengan mobilitas penduduk selama ini, adalah mengkaji mobilitas penduduk yang tidak terkena pembangunan, seperti Lee (1987), Todaro (1979) dan Mantra (1992), yang oleh Naim (1976) dikategorikan lebih bersifat merantau dengan tujuan mencari mata pencaharian untuk meningkatkan penghasilan yang lebih baik. Sifat tinggalnya sementara dan punya harapan kembali ke kampung halamannya. Perpindahan yang terjadi disebabkan oleh banyak faktor, yaitu faktor internal baik yang terkait dengan aspek ekonomi, sosial, politik maupun agama (Hugo, 1985, Mantra, 1985). Temple (1986 :84) , mengungkapkan bahwa sebab-sebab utama orang meninggalkan daerahnya (desa) disebabkan oleh sulitnya mendapatkan pekerjaan karena lapangan pekerjaan yang semakin terdesak, upah rendah, dan penghasilan yang tidak menentu atau musiman. Didaerah perkotaan, lapangan pekerjaan relatif terbuka, penghasilan lebih tinggi, relatif menentu dan kehidupan kota yang lebih bergairah. Marbun (1979:20) juga mengungkapkan bahwa proses kemiskinan di pedesaan karena lapangan kerja yang terbatas, pendapatan yang rendah dan adat istiadat yang ketat menyebabkan tidak senang tinggal di desa, keinginan melanjutkan pendidikan/sekolah, mutasi pekerjaan, ikut keluarga, bosan di desa, ingin berdiri sendiri (mandiri) alasan keluarga dan adanya perselisihan dengan keluarga merupakan faktor-faktor pendorong bagi seseorang untuk melakukan migrasi ke kota.

Mobilitas penduduk pada saat sekarang ini tidak hanya terkait dengan faktor internal seperti tersebut di atas yang lebih menekankan kepada faktor ekonomi, akan tetapi dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berdampak terhadap aspek sosial dan budaya penduduk yang bersangkutan. Dalam hal ini populasi yang terkena pembangunan diharuskan untuk pindah yang berarti harus meninggalkan sistem nilai dan budayanya yang telah melenbaga dalam kehidupan mereka Disatu pihak

pembangunan harus berjalan, tetapi di pihak lain penduduk harus pindah dan menyesuaikan dengan lingkungannya yang baru. Perpindahan karena desakan pembangunan dapat menimbulkan pilihan daerah yang beragam karena terkait dengan kepentingan individu akan tetapi juga secara psikologis ketidaksiapan penduduk untuk meninggalkan daerahnya, sehingga perpindahannya berulang-ulang. Perbedaan pilihan daerah terkait dengan status sosial ekonomi, sehingga terjadi polarisasi berdasarkan strata sosial masyarakat yang bersangkutan dan ketidaksiapan penduduk karena keterpaksaan atau tidak ada niatan untuk meninggalkan daerahnya.

Strata sosial adalah suatu pembagian hal-hal yang sangat dihargai oleh masyarakat, seperti kekayaan, kekuasaan, prestise, keterampilan, hak-hak istimewa dan pendidikan (Koentjaraningrat, 1984). Berdasarkan kriteria tersebut kemudian masyarakat memberi penghargaan yang tinggi dengan memposisikan seseorang berada pada kedudukan yang lebih tinggi dari yang lainnya. Sebagai contoh, pemilikan kekayaan, maka mempunyai kekayaan menempatkan kedudukan seseorang lebih tinggi dari kepangkatan atau ilmuwan. Begitu sebaliknya, suatu masyarakat yang lebih menghargai ilmu pengetahuan maka jenjang atau tingkat pendidikan yang lebih tinggi menempatkan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Pada masyarakat petani dengan pendidikan yang relatif rendah atau masyarakat yang homogen yang sebagian besar pencahariannya bersumber dari sektor pertanian, luas pemilikan lahan mempunyai penghargaan yang tinggi dibandingkan dengan yang lainnya, sehingga pelapisan sosial yang terbentuk berdasarkan luas pemilikan lahan.

IV. DAMPAK PEMBANGUNAN TERHADAP KEPENDUDUKAN

Pada suatu pembangunan terdapat penduduk yang terkena langsung dan tidak terkena langsung. Populasi yang terkena langsung adalah yang bertempat tinggal di daerah tapak pembangunan dan semua asetnya terkena pembangunan, sehingga harus pindah. Penduduk yang tidak terkena langsung adalah penduduk yang bermukim di luar tapak pembangunan yang mempunyai aset di daerah tapak pembangunan dan penduduk yang tidak mempunyai aset di daerah tapak

pembangunan tetapi merupakan sumber penghidupannya, yaitu petani pemilik dan buruh tani.

4.1. Minat Pindah

Pada pembangunan yang tidak tersendat-sendat dan pada pembangunan yang tersendat-sendat, terlebih dahulu dilakukan penelitian yang terkait dengan minat pindah. Penelitian dilaksanakan pada tahap pra-konstruksi untuk menjangkau kemana populasi akan pindah dan bagaimana cara kepindahannya dengan maksud mempercepat pengosongan tapak pembangunan. Pemerintah sebagai fasilitator dalam hal ini memfasilitasinya sesuai dengan asPIR-BUNasi masyarakat yang bersangkutan.

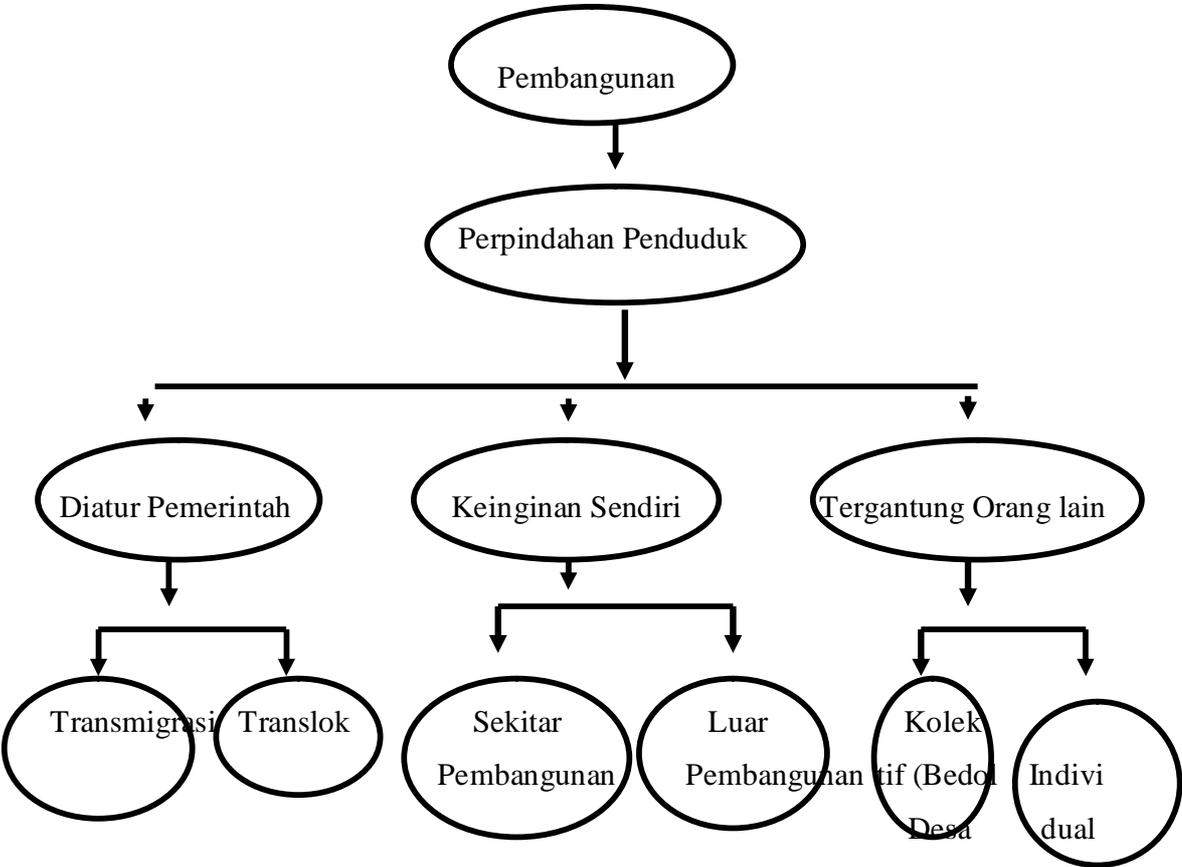
Dari beberapa hasil penelitian, Minat pindah populasi yang terkena pembangunan erat terkait dengan pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Pada pembangunan yang langsung direalisasikan dan atau terwujudkan perpindahan dianjurkan pada tahap pra-konstruksi, sehingga menunjang kelancaran pembangunan. Sebaliknya pada pembangunan yang tersendat-sendat, perpindahan populasi juga tersendat-sendat seiring dengan aktivitas pembangunan itu sendiri. Minat pindah populasi pada pembangunan yang tidak tersendat-sendat menunjukkan keajegan, yaitu mereka langsung pindah ke daerah tujuannya. Sebaliknya pada pembangunan yang tersendat-sendat rencana perpindahan atau minat pindah populasi relatif rendah dan tidak ajeg atau berubah-ubah dari tahun ke tahun. Hasil studi yang dilakukan PPSDFAL (1992 dan 2004), penduduk yang sudah merencanakan pindah disekitar genangan sebanyak 86,0 % pada tahun 1992 menurun menjadi 13 % pada tahun 2004. Sebaliknya yang belum merencanakan pindah dan mengurungkan kepindahannya menunjukkan peningkatan dari 14,0 % pada tahun 1992 menjadi 87 % pada tahun 2004. Fluktuasi minat pindah tersebut terkait dengan pelaksanaan pembangunan yaitu semakin cepat pembangunan, semakin cepat perpindahan penduduk. Sebaliknya, semakin lambat pelaksanaan pembangunan perpindahannya semakin lambat.

Secara universal minat pindah terbagi ke dalam tiga kategori yaitu, diatur pemerintah, berdasarkan keinginan sendiri dan tergantung kepada orang lain. Pada kasus pembangunan yang tersendat-sendat minat mengikuti program transmigrasi dan transmigrasi lokal yang diatur pemerintah cukup fluktuatif, yaitu dari 2 % pada tahun 1992 menurun menjadi 0,04 % pada tahun 1996 dan meningkat lagi menjadi 2,7 % pada tahun 2000 tetapi tidak ada yang berminat pada tahun 2004. Minat pindah pada pembangunan berdasarkan keinginan sendiri sebagian besar memilih daerah sekitar genangan yaitu 61,5 % pada tahun 1996, tetapi kemudian menurun menjadi 6,4 % pada tahun 2004. Pada program transmigrasi fluktuasi minat pindah terkait dengan informasi negatif tentang daerah tujuan dan adanya transmigran yang kembali ke daerah asalnya. Kembalinya transmigran membawa dampak negatif terhadap program transmigrasi, sehingga minat mengikuti program transmigrasi rendah sekali. Sebaliknya penduduk yang belum merencanakan pindah menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun, yaitu dari 14 % pada tahun 1992 meningkat menjadi 17,6 % pada tahun 1996 dan meningkat kembali menjadi 69,9 % pada tahun 2000 dan 87,0 % pada tahun 2004 (PPSDAL, 1992, 1996, 2000 dan 2004). Ini artinya bahwa minat pindah terkait dengan realisasi dari pembangunan itu sendiri. Pada pembangunan yang terealisasikan fluktuasi minat pindah tidak dijumpai karena mereka langsung pindah, yang terjadi adalah perpindahan kembali. Menyikapi minat pindah yang relatif kecil ini, kemudian pemerintah menawarkan program transmigrasi lokal. Sasarannya adalah petani gurem atau golongan miskin yang hanya mengandalkan dari sektor pertanian.

4.2. Perpindahan

Secara konseptual, perpindahan adalah berpindahnya penduduk dari suatu daerah ke daerah lain melewati batas administrasi dengan niatan untuk menetap di daerah tujuan. Konsepsi dari perpindahan ini berdasarkan dorongan internal yang dipertimbangkan secara matang oleh individu yang bersangkutan. Perpindahan populasi yang terkena pembangunan karena pengaruh faktor eksternal. Artinya,

mereka **tidak ada niatan** dan atau **tidak merencanakan pindah** dan kepindahannya karena terpaksa atau bukan atas inisiatifnya sendiri, sehingga pengambilan keputusannya lebih bersifat kolektif. Pengambilan keputusan untuk pindah tersebut terdapat tiga pola perpindahan, baik pada pembangunan yang sudah terwujudkan maupun pada pembangunan yang belum terwujudkan. Pola perpindahan dimaksud ialah yang diatur pemerintah, pilihan sendiri dan tergantung orang lain.



Gambar : 1. Pola perpindahan dan pilihan daerah

4.2.1. Diatur Pemerintah

1. Transmigrasi

Program transmigrasi yang dicanangkan pemerintah terhadap penduduk yang terkena pembangunan, sepertihalnya diberlakukan terhadap penduduk yang tidak terkena pembangunan. Perbedaannya adalah bagi yang tidak terkena pembangunan berdasarkan pemilihan sendiri yang disebut transmigrasi swakarsa. Mereka memilih pola perkebunan inti rakyat (PIR-BUN), yang berarti berpisah dengan teman, kerabat atau saudaranya, sekalipun pemberangkatannya bersama-sama. Pola PIR-BUN yang dipilihnya baik perkebunan kelapa sawit maupun perkebunan cokelat mendapatkan lahan seluas 2 ha setiap KK yang akan menjadi miliknya setelah mencicilnya selama 15 tahun. Keberhasilan transmigran pola ini mendapatkan lahan yang menjadi hak miliknya, dapat menopang ekonomi rumah tangganya dan menetap di daerah tersebut. Bagi yang terkena pembangunan ditempatkan sesuai dengan minat pindahnya, yaitu secara perorangan dan kolektif atau *bedol kampung/bedol desa*. Mereka termasuk transmigrasi swakarya (umum) dengan matapencahariannya bertani kembali yaitu bercocok tanam padi.

Transmigran swakarya mendapatkan lahan pertanian 2,5 ha tiap KK dan jaminan lainnya, ditempatkan secara mengelompok atau secara *bedol kampung/bedol desa*. Ini berarti mereka berkumpul kembali dengan saudara, kerabat, teman dan tetangganya. Usaha tani yang dilakukannya bercocok tanam padi sering mendapat gangguan hama penyakit, sehingga produksinya pun rendah. Begitupula dengan nilai jualnya yang rendah tidak seimbang dengan biaya produksi yang dikeluarkannya. Bercocok tanam padi yang kurang menguntungkan ini berdampak terhadap ekonomi rumah tangganya tidak seperti pola PIR-BUN, sehingga tidak sedikit diantara mereka yang pulang kembali ke daerah asalnya.

Tabel 1. Persamaan dan perbedaan pola PIR-BUN dan non-PIR-BUN

No.	Pola PIR-BUN (Kelapa sawit dan Karet)	Bercocok tanam padi
1.	Mendapatkan rumah	Mendapatkan rumah
2.	Mendapatkan Jadup 1 – 2 tahun	Mendapatkan Jadup 1 – 2 tahun
3.	Mencicil lahan perkebunan 2 ha tiap KK selama 15 tahun	Mendapatkan lahan pertanian 25 ha tiap KK
4.	Lahan digarap sendiri	Lahan digarap sendiri
5.	Jenis tanaman Kelapa sawit/karet	Jenis tanaman padi, palawija
6.	Penanaman satu kali	Penanaman setiap musim
7.	Pemeliharaan/perawatan secara rutin	Pemeliharaan/perawatan sesuai dengan perkembangan tanaman
8.	Relatif tidak ada hama	Relatif banyak hama
9.	Hama relatif dapat diatasi	Hama relatif sulit diatasi (babi hutan)
10.	Biaya produksi relatif rendah	Biaya produksi relatif tinggi
11.	Panen setelah 6 tahun	Panen setiap musim
12.	Pemasaran kebun	Pemasaran sesuai kebutuhan
13.	Produksi dibeli langsung oleh pabrik	Produksi dijual kepada tengkulak
14.	Hasil panen cukup menguntungkan	Hasil panen kurang menguntungkan
15.	Transmigran berhasil/menetap	Transmigran tidak berhasil /kembali ke daerah asal

Sumber : Data Primer : 2007

2. Transmigrasi Lokal

Seperti halnya pada program transmigrasi, program transmigrasi Lokal (Translok) merupakan salah satu alternatif pilihan daerah yang ditawarkan pemerintah terhadap populasi yang terkena pembangunan. Lokasi yang ditawarkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak pemerintah dengan calon

transmigran. Artinya, daerah yang ditawarkan berdasarkan **minat** calon dan ditinjau terlebih dahulu. Daerah yang diminati kemudian dikaji kelayakannya yaitu untuk mengetahui daya dukung lahan yang akan diberikan kepada setiap KK dan alternatif usaha lainnya. Hal ini dimaksudkan agar penduduk dapat hidup layak dan atau keadaan ekonomi rumah tangganya relatif lebih baik atau relatif sama dengan sebelumnya.

Hasil kajian lokasi yang dilakukan PPSDAL (1996) pada program translok setiap KK mendapatkan lahan 0,8 ha dengan rincian 0,5 ha untuk bercocok tanam padi, 0,2 ha tanaman rumput untuk pakan ternak dan 0,1 ha lahan pekarangan yang harus dimanfaatkan untuk tanaman sayuran sebagai warung hidup. Lahan seluas 0,2 ha adalah untuk tanaman rumput bagi 2 ekor sapi dan oleh karena itu setiap petani memelihara sapi tidak lebih dari 2 ekor sapi sebagai penghasilan tambahan. Namun, dalam perkembangannya transmigran yang dipindahkan tidak sedikit dari mereka yang kembali ke daerah asalnya setelah bertahan kurang dari 5 tahun. Hasil Studi Ema (2000) terhadap penduduk yang dimukimkan di daerah transmigrasi lokal dari 95 KK yang dipindahkan hanya menyisakan 6 KK (6,3 %) yang masih bertahan atau sebanyak 89 KK (93,7 %) kembali ke daerah asalnya.

Keberhasilan dan ketidakberhasilan transmigran erat terkait dengan faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang utama adalah keinginan yang kuat dari dalam diri individu yang bersangkutan yang menjadi motivasi untuk dapat meningkatkan ekonomi rumah tangganya dan atau untuk dapat bertahan hidup di tempat yang baru. Faktor eksternal adalah adanya pengaruh luar terutama pengaruh lingkungan masyarakat setempat yang berada disekitarnya dan kebijakan pemerintah itu sendiri. Perbedaan budaya transmigran dengan budaya masyarakat setempat serta gangguan kamtibmas selama mereka berada di tempat yang barunya itu telah menimbulkan ketidakbetahan dan ketidaknyamanan. Begitupula kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusannya untuk kembali ke daerah asalnya.

4.2.2. Keinginan Sendiri

Perpindahan penduduk baik yang tidak terkena pembangunan maupun yang terkena pembangunan dan perpindahan pada pembangunan yang tidak tersendat-sendat maupun pada pembangunan yang tersendat-sendat, selain diatur oleh pemerintah juga atas keinginannya sendiri. Kepindahan atas pilihannya sendiri merupakan bagian terbesar dari populasi yang terkena pembangunan. Sebagai contoh, pada pembangunan PLTA Saguling penduduk yang pindah atas pilihannya sendiri sebanyak 69,1 % dan pada PLTA Cirata 59,1 %. Pada pembangunan Waduk Jatigede yang merencanakan pindah atas pilihannya sendiri sebanyak 59,4 % (PPSDAL, 1985, 1984 dan 1992). Penduduk yang pindah berdasarkan keinginannya adalah golongan kaya yang memilih pindah ke daerah sekitar pembangunan. Disadari bahwa harga lahan disekitar pembangunan lebih mahal dan meningkat dengan tajam terutama pada saat pembayaran ganti rugi, akan tetapi golongan kaya mampu membelinya dan membangun rumahnya dari uang kompensasi yang diterimanya.

Kepindahan populasi atas keinginan sendiri baik yang langsung pindah ataupun masih merupakan wacana tidak difasilitasi oleh pemerintah, kecuali secara kebetulan mengelompok lebih dari 50 KK pada suatu daerah tertentu. Kepindahan atas keinginan sendiri ini karena adanya pilihan daerah yang berbeda-beda antar individu yang tidak terlepas dari pertimbangan sosial, ekonomi dan budaya penduduk yang bersangkutan. Mereka ini adalah golongan kaya yang mampu untuk mandiri ditempat yang baru. Berdasarkan keinginan sendiri baik yang sudah merencanakan maupun yang belum merencanakan mengacu kepada kondisi daerah yang menjadi pilihannya. Rencana kepindahan yang tergantung kepada orang lain terbagi kedalam dua bagian yaitu perpindahannya secara kolektif dan individual. Perpindahan secara kolektif terutama bagi golongan miskin, yaitu mengharapkan ditempatkan pada suatu tempat secara mengelompok atau "bedol kampung/desa" dan difasilitasi oleh pemerintah. Perpindahan bagi golongan menengah secara individual atas pilihan sendiri lebih menunggu kepindahan orang lain (*kumaha guyubna.*).

Kepindahan penduduk atas pilihan sendiri pada pembangunan yang terwujudkan langsung pindah ke daerah yang menjadi pilihannya. Mereka merintis kehidupannya ditempat yang bau baik dengan cara bertani kembali, berdagang ataupun usaha lainnya. Pada pembangunan yang tersendat-sendat terdapat penduduk yang langsung pindah dan tidak langsung pindah. Penduduk yang langsung pindah masih menggarap lahan yang sudah diganti rugi, sehingga melakukan sirkulasi dan atau pindah kembali ke daerah asalnya.

4.2.3. Tergantung Orang Lain

Perpindahan penduduk yang terlena pembangunan lebih dari 50 % ketergantungan kepada orang lain dibandingkan atas keinginan sendiri yaitu sekitar 35 % dan yang diatur pemerintah melalui program transmigrasi dan transmigrasi lokal berkisar antara 2 % - 15 %. Rendahnya minat mengikuti program transmigrasi terkait dengan faktor sosial dan budaya serta jarak antara daerah asal dengan daerah tujuan. Lee (1987) mengungkapkan bahwa penduduk yang melakukan migrasi atau sirkulasi lebih banyak memilih daerah yang dekat, sehingga relatif mudah untuk melakukan sirkulasi dan atau perpindahan kembali.

Penduduk yang kepindahannya tergantung kepada orang lain, lebih banyak terjadi pada pembangunan yang tersendat-sendat karena dianggap belum ada kepastian kelanjutannya dan masih dapat menggarap lahannya yang telah diganti rugi. Mereka juga beranggapan bahwa di tempat yang baru dengan kondisi daerah yang berbeda belum tentu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketergantungan terhadap orang lain mengandung dua pengertian, yaitu akan pindah atas keinginannya sendiri apabila orang lain sudah pindah dan yang menginginkan kepindahannya dengan cara *bedol kampung/bedol desa*. Kategori pertama yang kepindahannya atas pilihan sendiri adalah golongan menengah dan belum pindah dengan pertimbangan belum ada kepastian dan masih dapat menggarap lahannya yang sudah diganti rugi. Pada kategori yang kedua yang menyatakan tergantung orang lain adalah golongan miskin

yang kepindahannya menginginkan bersama-sama dengan kerabat, teman, tetangga ditempatkan pada suatu lokasi yang sama atau *bedol desa/bedol kampung*.

4.3. Pemilihan Daerah

Populasi diharuskan segera pindah pada tahap pra-konstruksi terutama setelah mendapat ganti rugi. Daerah kepindahannya berdasarkan pilihan sendiri dan yang ditawarkan pemerintah. Populasi yang memilih daerah berdasarkan pilihannya lebih banyak memilih daerah yang berdekatan dengan daerah asalnya disekitar tapak pembangunan dan hanya sebagian kecil saja yang memilih daerah luar tapak pembangunan. Pertimbangan pada pilihan daerah yang pertama lebih pada pertimbangan budaya, yaitu tidak akan mengalami perubahan yang berarti atau *moal ngarumas*, karena masih dalam lingkungan sosial yang sama. Dilain pihak terdapat yang memilih di luar tapak pembangunan tetapi masih dalam kabupaten yang sama dengan pertimbangan harga-harga lahan tidak terpengaruh oleh proyek atau relatif lebih murah dibandingkan dengan harga lahan di daerah sekitar pembangunan yang pada saat pembebasan lahan meningkat dengan tajam, sehingga luas pemilikannya relatif tidak berkurang.

Daerah yang ditawarkan dalam hal ini pemerintah menawarkan beberapa lokasi atau daerah penampungan yaitu daerah luar Pulau Jawa melalui program transmigrasi dan daerah dalam provinsi yang sama melalui program transmigrasi lokal. Penduduk yang memilih daerah luar Pulau Jawa langsung difasilitasi oleh pemerintah diawali dari rumah tinggal, lahan garapan, jadup selama beberapa tahun dan sarana prasarana penunjang lainnya. Namun demikian, penduduk yang memilih daerah luar Pulau Jawa melalui program transmigrasi hanya 2 %. Begitu pula yang memilih daerah dalam provinsi yang sama melalui program transmigrasi lokal hanya 15 % (PPSDAL, 1992 dan 2000).

Daerah-daerah yang ditawarkan pemerintah nampaknya kurang menarik minat dengan beberapa alasan yang terkait dengan aspek sosial dan budaya, seperti disajikan pada tabel 2. Pada tabel tersebut kondisi geografis dan lingkungan sosial

ekonomi dan budaya menentukan pilihan daerah dan aspek budayanya lebih menonjol dalam pengambilan keputusan bagi penduduk yang terkena pembangunan.

Tabel : 2. Pertimbangan pemilihan daerah kepindahan berdasarkan jarak

No.	Jarak dengan daerah asal	
	Dekat	Jauh
1.	Lingkungan fisik relatif sama	Lingkungan fisik berbeda
2.	Lingkungan sosial budaya sama	Lingkungan sosial budaya berbeda
3.	Kemungkinan akan berhasil	Belum tentu berhasil
4.	Dekat dengan saudara	Jauh dengan saudara
5.	Terdapat teman/tetangga	Tidak ada teman/tetangga
6.	Tidak akan <i>ngarumas</i>	Akan <i>ngarumas</i>
7.	Dapat bekerja sama	Belum tentu dapat bekerja sama
8.	Dapat saling membantu	Belum tentu saling membantu
9.	Menengok saudara/kerabat setiap saat	Menengok saudara/kerabat tertentu
10.	Dapat berkumpul kembali dengan kerabat	Belum tentu berkumpul kembali dengan kerabat

Sumber : Suwartapradja, 1982.

1. Daerah Luar Pulau Jawa

Daerah luar pulau Jawa merupakan salah satu daerah atau lokasi yang ditawarkan pemerintah melalui program transmigrasi, seperti Bengkulu, Jambi, Riau, Sumatera, Kalimantan dan Irianjaya. Secara konseptual program ini cukup ideal karena KK yang berlatar belakang bertani akan mendapatkan lahan kembali yang lebih luas dari pemilikan semula yaitu 2,5 ha tiap KK. Sasarannya adalah golongan miskin atau petani gurem, akan tetapi yang berminat sedikit sekali hanya sekitar 2 % (PPSDAL, 1992). Rendahnya minat pindah ke daerah luar Pulau Jawa juga terjadi pada penduduk yang terancam bencana alam yaitu penduduk yang berada dikaki

Gunung Merapi di Jawa Tengah yang menyatakan bahwa tanah seberang tidak menarik (Singarimbun, 1976). Ini menunjukkan bahwa baik penduduk yang terkena pembangunan maupun yang terkena bencana alam kurang berminat memilih daerah luar Pulau Jawa. Lee (1987: 4) yang mengkaji tentang mobilitas penduduk yang tidak terkena pembangunan, menunjukkan gejala yang sama yaitu faktor jarak menjadi salah satu pertimbangan calon migran dalam pemilihan daerah tujuan. Mereka lebih memilih daerah yang dekat karena terkait dengan sistem nilai dan budaya penduduk yang bersangkutan (Lee, 1987, PPSDAL, 2000; 2004).

Pertimbangan jarak antara daerah asal dengan daerah tujuan baik pada penduduk yang tidak terkena maupun yang terkena pembangunan sebetulnya cukup rasional, yaitu pada daerah yang jaraknya relatif jauh mempunyai risiko yang tinggi dibandingkan dengan daerah yang relatif dekat. Daerah yang jauh dan budaya masyarakat yang berbeda dikhawatirkan tidak betah dan relatif sulit untuk kembali ke daerah asalnya. Pertimbangan kembali ke daerah asal mengindikasikan bahwa motivasi untuk pindah lemah sekali karena kepindahannya terpaksa atau **tidak ada niatan** untuk pindah seperti migran yang tidak terkena pembangunan. Kegagalan beradaptasi dengan lingkungannya yang baru menjadi salah satu pertimbangan untuk kembali ke daerah asalnya.

2. Daerah Provinsi yang Sama

Daerah dalam provinsi yang sama merupakan salah satu alternatif pilihan kepindahan yang ditawarkan pemerintah setelah mengkaji rendahnya minat pindah ke luar Pulau Jawa melalui program transmigrasi. Minat pindah ke daerah provinsi yang sama melalui program transmigrasi lokal yang difasilitasi oleh pemerintah lebih baik daripada minat mengikuti program transmigrasi yaitu sekitar 15 % dari seluruh populasi (PPSDAL, 2000). Mereka ini adalah golongan miskin atau petani gurem dan memperoleh kompensasi relatif kecil, sehingga tidak memungkinkan dapat membeli lahan di daerah sekitar pembangunan yang meningkat dengan tajam yaitu 2 – 3 kali lipat dari harga kompensasi terutama pada saat dilaksanakannya ganti rugi.

Penduduk yang memilih daerah dalam provinsi yang sama, sekalipun jumlahnya relatif kecil terkait dengan sistem nilai dan budaya mereka, yaitu menginginkan ditempatkan pada suatu lokasi secara mengelompok atau *bedol kampung* dengan matapecaharian bercocok tanam padi kembali seperti yang dilakukannya. Oleh karena itu, sekalipun lokasi yang ditawarkan dalam provinsi yang sama ditinjaunya terlebih dahulu karena dikhawatirkan kondisi lahannya tidak sesuai dengan sistem pertanian yang dilakukannya. Artinya, mereka ingin bertani kembali dengan menggarap lahan yang dialokasikan pemerintah dan bukan untuk menjadi buruh tani atau menjadi buruh perkebunan. Pertimbangannya itu cukup rasional oleh karena berburuh atau menjadi buruh pada suatu perkebunan dapat dieksploitir oleh pihak perusahaan, sehingga sulit untuk berkembang dan atau mencapai tahap kehidupannya sama atau lebih baik dari semula (Suwartapradja, 1982). Kasus ini, seperti temuan Gunawan (1995) pada perkebunan kepala sawit, bahwa petani inti hanya menjadi buruh dan kehidupan ekonominya tidak berkembang.

3. Daerah Sekitar Pembangunan

Daerah sekitar pembangunan dimaksud adalah daerah yang secara administratif dalam desa yang sama dan atau luar desa tetapi masih dalam kecamatan yang sama. Pada beberapa proyek pembangunan bendungan atau Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) lebih dari 50 % memilih daerah sekitar genangan (PPSDAL, 1992; 2000). Mereka yang pindah disekitar pembangunan tersebut adalah golongan kaya yang mampu membeli lahan didaerah tersebut. Pertimbangan pemilihan daerah sekitar karena ingin menikmati pembangunan itu sendiri dan dapat mengembangkan usahanya. Pada pembangunan yang tersendat-sendat penduduk yang pindah ke daerah sekitar pembangunan masih menggarap lahannya yang sudah diganti rugi dengan cara sirkulasi. Pola ini hanya bertahan beberapa tahun saja dan kemudian kembali lagi ke daerah asalnya.

Pada beberapa pembangunan penduduk golongan menengah dan miskin yang pindah ke sekitar pembangunan dengan pertimbangan untuk bertani kembali dan

tidak sulit mencari pekerjaan sebagai buruh tani. Golongan menengah kemudian bertani kembali menggarap lahannya yang tidak terkena pembangunan dan anak-anak mereka beralih ke sektor informal di kota, sedangkan buruh tani menjadi buruh tani kembali, menjadi buruh seabutan dan mencari peluang usaha sebagai pengumpul udang dipinggiran situ (Suwartapradja, 1989).

4. Daerah Luar Pembangunan

Daerah luar pembangunan dimaksud adalah daerah yang secara administratif diluar kecamatan tetapi dalam kabupaten yang sama dan atau luar kabupaten dalam provinsi yang sama. Pemilihan daerah yang pertama terkait dengan aspek sosial ekonomi dan budaya, seperti harga lahan yang relatif lebih murah, jarak yang relatif dekat dan dalam lingkungan budaya yang sama, sehingga diperkirakan tidak akan mengalami perubahan yang berarti (*moal ngarumas*) dalam menata kehidupannya di tempat yang baru. Pertimbangan pemilihan daerah yang kedua, mengikuti anak karena usia lanjut. Anak-anak mereka berada di luar kecamatan atau di luar kabupaten karena ikatan pekerjaan dan atau ikatan perkawinan, baik anak laki-laki maupun perempuan. Orang tua lebih banyak mengikuti anak perempuannya karena lebih telaten dalam pelayanan dan perawatan dibandingkan dengan anak laki-laki. Sebaliknya mengikuti anak laki-laki dikhawatirkan merepotkan menantu dan merasa malu apabila terlalu sering dilayani dalam kondisi lanjut usia.

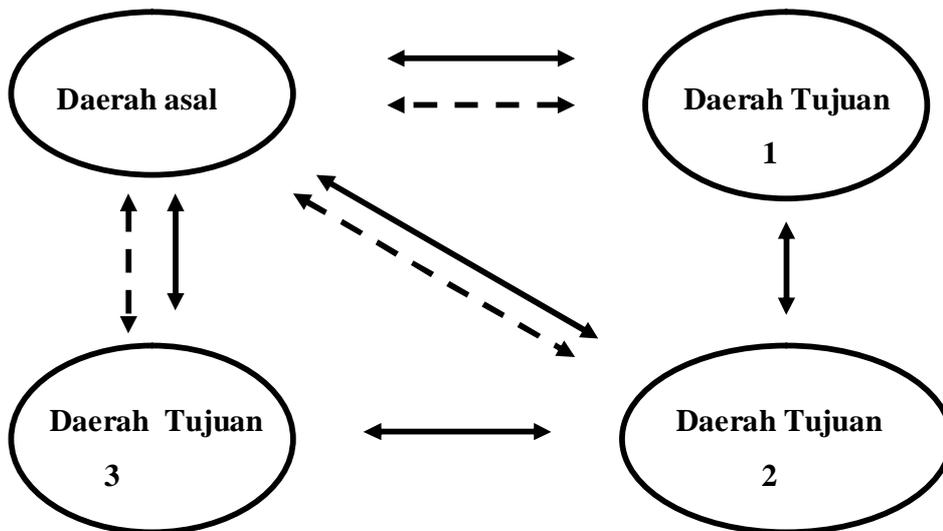
Penduduk yang memilih luar daerah ini adalah golongan menengah dengan pertimbangan cukup rasional yaitu harga lahan di daerah tersebut relatif lebih murah dan tidak terpengaruh oleh proyek, sehingga dapat membeli lahan sawah kembali dengan luasan yang relatif sama dari uang konvensasi yang diterimanya. Pertimbangan ini cukup rasional, oleh karena luas kepemilikan lahannya tidak berkurang dan atau mungkin bertambah, sehingga mereka dapat bertani kembali secara mandiri.

4.4. Mobilitas Penduduk

Mobilitas penduduk yang terkena pembangunan erat terkait dengan realisasi dari pembangunan itu sendiri. Artinya, pembangunan yang langsung terwujudkan relatif tidak menimbulkan masalah karena penduduk segera mengambil keputusan untuk pindah atau migrasi (*migration*). Sebaliknya, pada pembangunan yang berlarut-larut menunjukkan pola mobilitas yang permanen (*migrasi*) dan tidak premanen (*sirkulasi*) serta tidak segera pindah. Bagi yang kedua dan yang terakhir dapat menimbulkan kumulatif permasalahan yang pada gilirannya dapat menimbulkan problematika bagi kelanjutan pembangunan itu sendiri. Penduduk yang sudah pindah melakukan sirkulasi karena masih menggarap lahannya yang sudah diganti rugi dan kemudian kembali lagi ke daerah asalnya semula. Dampak dari perpindahan ini masalah yang berkembang kemudian adalah masalah sosial yang semakin kompleks di daerah tapak pembangunan, yaitu penduduk enggan untuk pindah, masih banyak orang lain yang belum pindah. Dilain pihak yang belum pindah mengajukan persyaratan kepindahannya dan menuntut ganti rugi kembali terhadap aset-aset mereka. Permasalahan sosial di daerah tapak pembangunan kemudian bertambah semakin rumit dengan kembalinya penduduk yang sudah pindah tadi ke daerah asalnya.

Perpindahan penduduk yang terkena pembangunan dan atau karena faktor eksternal pengambilan keputusannya relatif tidak ajeg dibandingkan dengan penduduk yang tidak terkena pembangunan. Bagi penduduk yang tidak terkena pembangunan cukup ajeg karena dipertimbangkan secara matang termasuk mempertimbangan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dan alternatif pemecahannya. Mereka sudah mengantisipasinya dari sejak dini dalam merintis dan atau mengembangkan ekonomi rumah tangganya. Kepindahan dari pengaruh eksternal pengambilan keputusannya tidak sematang karena **tidak ada niatan** untuk pindah. Mereka dihadapkan kepada suatu kondisi yang berbeda baik dari aspek fisik maupun sosial dan harus mengadaptasikan dirinya dengan lingkungannya yang baru.

Pembangunan yang tidak tersendat-sendat dan pembangunan yang tersendat-sendat menunjukkan adanya pola mobilitas yang berbeda. Pada pembangunan yang tidak tersendat, penduduk yang pindah ke daerah tujuan secara permanen atau migrasi (Akhmad dan Suwartapradja, 1985). Namun pada kasus ini terjadi perpindahan kembali dari satu daerah ke daerah lainnya (Suwartapradja, 1982, Mantra 1985). Berpindah-pindah daerah, seperti kemukakan Mantra (1985, Lee, 1987) pada penduduk yang tidak terkena pembangunan maupun yang terkena pembangunan alasan utama mereka adalah motif ekonomi. Artinya, mereka memilih-milih daerah yang secara ekonomis lebih menjanjikan atau lebih menguntungkan bagi kelangsungan hidupnya. Pada pembangunan yang tersendat-sendat seperti disajikan pada gambar 2 terjadi perpindahan kembali dan sirkulasi antara tempat tujuan dengan daerah asalnya semula.



Keterangan : ————— = migrasi pada pembangunan yang terwujudkan
 - - - - - = migrasi dan sirkulasi pada pembangunan yang tersendat

Gambar : 2 Pola Mobilitas Penduduk pada Pembangunan Bendungan

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Mobilitas penduduk yang terkena pembangunan memberikan arti tersendiri dalam konteks mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk yang tidak terkena pembangunan lebih bersifat individual dan kepindahannya direncanakan dengan matang dan **ada niatan** untuk pindah (*migration*) atau sirkulasi (*circulation*) yang erat terkait dengan aspek ekonomi, sosial, agama dan politik (Hugo, 1985; Lee, 1974; Mantra, 1985). Mobilitas penduduk yang terkena pembangunan lebih bersifat kolektif, perencananya tidak matang, kepindahannya terpaksa dan atau **tidak ada niatan** untuk pindah (*migratiopn*) atau sirkulasi (*circulation*) dan erat terkait dengan aspek budaya, yaitu kepindahannya secara kolektif dan berkumpul kembali bersama kerabat, teman dan tetangga di tempat yang baru.

Secara universal migran yang terkena pembangunan baik yang tidak tersendat maupun yang tersendat langsung melakukan migrasi terhadap daerah tujuannya. Pada pembangunan yang tidak tersendat melakukan perpindahan kembali ke daerah tujuan lainnya. Pada pembangunan yang tersendat mobilitas yang terjadi sirkulasi antara daerahnya yang baru dengan daerah asalnya dan kemudian kembali lagi ke daerah asalnya untuk menggarap lahannya yang telah diganti rugi.

Migrasi yang terjadi baik pada pembangunan yang tidak tersendat maupun yang tersendat-tersempit terdapat 3 pola, yaitu diatur pemerintah, pilihan sendiri dan tergantung orang lain. Mereka yang kepindahannya diatur oleh pemerintah mengikuti program transmigrasi ke luar pulau Jawa dan transmigrasi lokal dalam provinsi yang sama adalah golongan miskin. Penduduk yang kepindahannya atas pilihan sendiri adalah orang kaya yang pindah disekitar genangan dan penduduk golongan menengah yang kepindahannya tergantung orang lain, yaitu memilih luar daerah pembangunan dalam kabupaten atau provinsi yang sama.

Dari temuan di atas dapat dikonsepsikan bahwa mobilitas eksternal adalah perpindahan penduduk yang disebabkan oleh suatu pembangunan yang meliputi 3 pola, yaitu diatur pemerintah, keinginan sendiri dan tergantung orang lain. Diatur

pemerintah melalui program transmigrasi dan transmigrasi lokal, pilihan sendiri pindah ke daerah sekitar pembangunan dan tergantung kepada orang lain pindah ke daerah sekitar dan luar pembangunan yang kepindahannya secara kolektif dan individual.

5.2. Saran

Penduduk yang terkena pembangunan yang tidak tersendat-sendat langsung melakukan migrasi, sedangkan pada pembangunan yang tersendat-sendat melakukan sirkulasi terhadap daerah asalnya, sehingga dapat menghambat kelanjutan pembangunan. Berdasarkan temuan tersebut, beberapa rekomendasi yang perlu mendapat perhatian adalah :

Adanya kepastian kelanjutan pembangunan dan pemindahan penduduk langsung dilakukan setelah menerima ganti rugi agar tidak menimbulkan masalah bagi kelanjutan pembangunan itu sendiri.

Pemindahan dan atau perpindahan penduduk yang terkena pembangunan seyogyanya mendapat perhatian dari pemerintah tidak hanya pada saat pemindahannya, akan tetapi juga setelah berada di tempat yang baru agar keadaan ekonominya lebih baik atau relatif sama seperti semula.

Daftar Pustaka

- Akhmad, Hisyam dan Opan S.Suwartapradja, 1985, Aspek Sosial Budaya Pemukiman Kembali, Makalah, Kursus Dasar-Dasar Analisis Dampak Lingkungan, Bandung, PPSDAL-LP-UNPAD kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup
- Adimihardja, Kusnaka dan Djuariah M Utja, 2.000, Nilai Anak pada Masyarakat Petani, Laporan penelitian, Kerjasama Departemen Pendidikan Nasional dengan Lembaga penelitian Universitas Padjadjaran
- Aninymous, 1990, Kajian Tentang Pola Migrasi di Indonesia, Yogyakarta, Kerjasama Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup dengan Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada
- Bennet, John William, 1976, Adaptation and Human Behavior dan Adaptation as Sosial Process dalam *The Ecological Transition Cultural Anthropologi and Human Adaptation*, New York, Pergamon Press.Inc.

- Budiman, Arief, 2000, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Effendi, Tadjudin Noor, 1992, Perilaku Mobilitas dan Struktur Sosial Ekonomi Rumah Tangga : Kasus Dua Desa di Jawa Barat, Yogyakarta, Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada
- Ema, 2000, Strategi Penduduk Pindahan Jatigede di Pakenjeng Garut, Skripsi, Jurusan Antropologi, Fisip, Unpad, Sumedang
- Gunawan, Rimbo, Juni Thamrin dan Mies Grijns, 1995, Dilema Petani Plasma, Pengalaman PIR-BUN-BUN Jawa Barat, Bandung, Akatiga
- Koentjaraningrat, 1984, Masyrakat Desa di Indonesia, Jakarta, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia
- Kepres, No. 55 tahun 1993, ***Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum,***
- Lee, Everett S, 1987, Suatu Teori Migrasi, Yogyakarta, Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada
- Mantra Ida Bagus, 1992, Mobilitas Penduduk Sirkuler Dari Desa Ke Kota di Indonesia, Yogyakarta, Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada
- Mantra, Ida Bagus, 1985, Pengantar Studi Kependudukan, Yogyakarta, Nurcahaya
- Mubyarto, Pny, 1985, Peluang Kerja dan Berusaha di Pedesaan, Yogyakarta, BPPE UGM
- Naim, Muchtar, 1976, Merantau Masyarakat Minangkabau, Jakarta, Pustaka Jaya
- PPSDAL, LP, UNPAD, 1984, ***Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*** , PPSDAL-LP-UNPAD dan PLN Pikitdro Jabar, Bandung, Pembangkit Listrik Tenaga Air, Saguling.
- PPSDAL, LP, UNPAD, 1985, ***Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*** , PPSDAL-LP-UNPAD dan PLN Pikitdro Jabar, Bandung, Pembangkit Listrik Tenaga Air Cirata
- PPSDAL, LP, UNPAD, 1992, ***Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*** , PPSDAL-LP-UNPAD dan DPU Diraktorat Jenderal Pengairan Proyek Pembangunan Waduk Jatigede.
- PPSDAL, LP, UNPAD, 1996, ***Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*** , PPSDAL-LP-UNPAD dan DPU Diraktorat Jenderal Pengairan Proyek Pembangunan Waduk Jatigede.
- PPSDAL, LP, UNPAD, 2000, ***Studi Potensi Minat masyarakat dan Pilihan Lokasi kepindahan Penduduk Jatigede secara berkelompok,*** DPU Diraktorat Jenderal Pengairan Proyek Pembangunan Waduk Jatigede.
- PPSDAL, LP, UNPAD, 2004, Reidentifikasi Penduduk Jatigede, Kerjasama DPU Diraktorat Jenderal Pengairan Proyek Pembangunan Waduk Jatigede
- Saefullah, A.Djadja, 2008, Modernisasi Perdesaan Dampak Mobilitas Penduduk, Bandung, Truenorth
- Saefullah, Asep Djadja, 1995, Mobilitas Penduduk Desa-Kota : Jembatan Modernisasi Pedesaan, Pidato Pengukuhann Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Kependudukan, Bandung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, 25 September
- Saefullah, Asep Djadja, 1999, Migrasi dan Perubahan Sosial Budaya, dalam Jurnal Kependudukan Padjadjaran, Bandung, Vol.1 No. 1, Januari

- Soemarwoto, Otto, 1983, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan* Jambatan, Jakarta
- Singarimbun, Masri dan D.H Penny, 1976, *Penduduk dan Kemiskinan*, Jakarta, Bhratara Karya Aksara
- Suparlan, Parsudi, Pny, 1993, *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta, Yayasan obor Indonesia
- Suwartapradja, 1982, *Aspek Sosial Budaya Pemukiman Kembali Penduduk yang Terkena Proyek PLTA Saguling*, *Makalah*, Seminar Bendungan, Kerjasama PPSDAL-UNPAD dengan PLN Pikitdro Jawa Barat
- Suwartapradja, Opan S, 1989, *Perikanan tangkap di Situ Saguling*, Laporan penelitian, Bandung, PPSDAL-LP-UNPAD.
- Suwartapradja, Opan S, 1976, *Nilai Anak Dalam Masyarakat Petani*, **Skripsi** Sarjana Muda, Bandung, Jurusan Antropologi, Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran
- Swasoso, Sri-Edi dan Masri Singarimbun, 1986, *Sepuluh Windu Transmigrasi di Indonesia (1905-1985)*, Jakarta, UI Press.
- Todaro, Michael P, 1992, *Kajian Ekonomi Migrasi Internal di Negara Berkembang*, Yogyakarta, Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.